

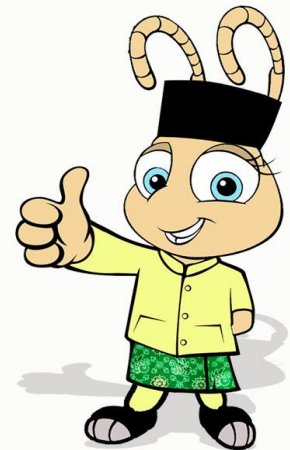


KOTA
Jambi

RENJA

RENCANA KERJA

2018



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



bpprd.jambikota@gmail.com



www.facebook.com/bpprd.jambikota



Telp. (0741) 40284

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa maka kami telah menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2018. Rencana Kerja ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2013 – 2018.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaannya.

Jambi, 2017

KEPALA BADAN

SUBHI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630820 198603 1009

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renja BPPRD Kota Jambi	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan BPPRD Kota Jambi	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPPRD Kota Jambi.....	14
a. Organisasi	14
b. Sarana dan Prasarana Mobilitas	15
c. Pendapatan Daerah	15
2.4 Analisa Isu – isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi BPPRD	18
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	19
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	 23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPPRD Kota Jambi	23
a. Tujuan Renja BPPRD Kota Jambi	23
b. Sasaran Renja BPPRD Kota Jambi	24
3.3 Target Pajak Daerah Tahun 2017	24
 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	 26
4.1 Program	26
4.2 Kegiatan	26
 BAB V PENUTUP	 28
LAMPIRAN	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	13
Tabel 2.2	14
Tabel 2.3	18
Tabel 3.1	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas pembantuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi serta Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut harus berpedoman pada Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang pelaksanaannya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi.

Untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijadikan dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (LP2P), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk mengidentifikasi program dan kegiatan serta menentukan besaran nilai pagu indikatif anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi.

b. Tujuan

1. Menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja.
2. Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana kerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun, sistematika rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SPKD
- 2.4 Analisa Isu- isu Strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi BPPRD
- 2.5 Review terhadap rancangan awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

BAB IV Program dan Kegiatan

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun 2016 dan Capaian Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dan selanjutnya dilakukan evaluasi–evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi .

Berikut ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 8.500.000,- dengan output jumlah surat terkirim selama 1 tahun.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 87.17%
Permasalahan : Kelebihan penganggaran jumlah personil
Solusi : Disesuaikan dengan kebutuhan

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 331.700.000,- dengan output pembayaran rekening telephone, listrik.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 67.62%
Permasalahan : Terjadi penurunan penggunaan daya listrik di gedung PBB di karenakan sedang di rehab.
Solusi : Untuk Tahun 2017 akan di bayarkan sesuai dengan kebutuhan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 284.710.000,- dengan output terlaksananya administrasi keuangan yang akurat.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 80.36%
Permasalahan : Website dalam proses maintenance sehingga

honorarium operator tidak dapat dibayarkan;
pejabat PPKom dijabat oleh PA sehingga
honorarium tidak dibayarkan.

Solusi : Disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 61.900.000,- dengan output tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan serta bahan pembersih.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 91.38%
Permasalahan : Belanja Jasa Tenaga kebersihan kantor menyesuaikan dengan standar.
Solusi : Akan mengikuti Standard harga TA. 2017.

5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 168.894.000,- dengan output tersedianya alat tulis kantor

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 88.00%
Permasalahan : Kertas continuousform utk UPTD tidak dibelanjakan.
Solusi : Akan mengikuti standard harga TA. 2017.

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 70.000.000,- dengan output tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 93.31%
Permasalahan : Efisiensi harga.
Solusi : Menyesuaikan kebutuhan dan standar harga

7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 12.705.000,- dengan output tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 100%
Permasalahan : Tidak Ada
Solusi : Tidak Ada

8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 23.780.000,- dengan output

tersedianya Tersedianya Surat Kabar dan Buku Peraturan Perundang – Undangan.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 76.89%
 Permasalahan : Pembelian buku peraturan perundang-undangan tidak dibelanjakan.
 Solusi : Menyesuaikan kebutuhan dan standar harga.

9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 24.245.000,- dengan output tersedianya kebutuhan makanan dan minuman.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 74.15%
 Permasalahan : Belanja Makan Minum di sesuaikan dengan
 Solusi : kebutuhan.
 Akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan rapat kerja dinas.

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 92.400.000,- dengan output terwujudnya tenaga pengamanan dan pengemudi kantor.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 79.76%
 Permasalahan : Dikarenakan salah satu Tenaga Sopir mengundurkan diri dan honoraium dibayarkan sesuai dengan kebutuhan.
 Solusi : Menambah tenaga sopir untuk tahun 2017.

11. Kegiatan Perjalanan Dinas.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 431.000.000,- dengan output terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 95.36%
 Permasalahan : Tidak ada.
 Solusi : Tidak Ada.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 400.000.000,- dengan output tersedianya Kendaraan Operasional yang Memadai.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 89.32%
 Permasalahan : Tidak Ada

Solusi : Tidak Ada

13. Kegiatan Pengadaan Mebeleur.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 125.950.000,- dengan output Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur Kantor.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 88.270%
Permasalahan : Belanja disesuaikan dengan harga pasar
Solusi : Akan mengikuti standard harga TA. 2017.

14. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 138.570.000,- dengan output Terlaksananya Peralatan Perkantoran.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 77.17%
Permasalahan : Belanja disesuaikan dengan harga pasar.
Solusi : Akan mengikuti standard harga TA. 2017.

15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 420.750.000,- dengan output Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 71.59%
Permasalahan : Dibayarkan sesuai kebutuhan.
Solusi : Akan mengikuti standard harga TA. 2017

16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat – Alat Kantor.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 78.000.000,- dengan output Tersedianya Jasa Service Peralatan Kerja..

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 43.99%
Permasalahan : - Belanja Pemeliharaan Komputer System tidak dilaksanakan .
- Service Mesin Antri tidak digunakan dikarenakan mesin tidak beroperasi.
Solusi : Akan mengikuti standard harga TA. 2017.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

17. Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 35.000.000,- dengan output Tersedianya Pengadaan Mesin Antri.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 99.94%

Permasalahan : Tidak Ada.
Solusi : Tidak Ada.

18. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 96.600.000,- dengan output Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 91.18%
Permasalahan : Tidak Ada
Solusi : Tidak Ada.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

19. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang _ Undangan.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 37.000.000,- dengan output Terpenuhi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 31.76%
Permasalahan : Minimnya kegiatan bimtek tentang perpajakan
Solusi : Akan berkordinasi dengan lembaga diklat perpajakan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

20. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 5.000.000,- dengan output Tersusunnya Lakip,RKT,Tapkin dan IKU.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 77.00%
Permasalahan : Standar penetapan honorarium melebihi standar
Solusi : Sesuai dengan kebutuhan

21. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 96.785.000,- dengan output Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah, Tersusunnya LaporanPenerimaan Pajak Daerah dan Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah Kota Jambi.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 92.37%
 Permasalahan : Tidak Ada
 Solusi : Tidak Ada

22. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 68.885.000,- dengan output Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 47.18%
 Permasalahan : Untuk SPPD tidak dilaksanakan karena bersamaan dengan kegiatan lain.
 Solusi : Akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan lain.

6. Program Perencanaan SKPD

23. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 15.150.000,- dengan output T Rencana Kerja SKPD.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 47.69%
 Permasalahan : Standar penetapan honorarium melebihi standar dan belanja makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan.
 Solusi : Akan disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa

7. Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

24. Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 268.635.000,- dengan output Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah dan Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah.

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 85.44%
 Permasalahan : Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan efisiensi.
 Solusi : Akan disesuaikan dengan yang dibutuhkan.

25. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 1.165.667.000,- dengan output Terlaksananya sistem dan Prosedur Pajak PBB dan BPHTB yaitu Fungsi Pelayanan, Fungsi Data dan Informasi, Fungsi Pembukuan

dan Pelaporan

- Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 89.75%
- Permasalahan : - Dikarenakan APBD-P baru mulai bulan Oktober 2016 maka pembayaran honorarium untuk bulan September tidak dibayarkan.
- Cetak piagam dan papan gabus tidak dilaksanakan pencetakannya di karenakan realisasi penerimaan PBB tidak mencapai realisasi 100%.
- Untuk pembayaran jasa tenaga perorangan belanja jasa kerja dibayarkan honor sebesar Rp. 1.100.000,- (Standar penetapan honorarium melebihi standar)
- Untuk hardisk SAS tidak dapat direalisasikan dikarenakan hardisk tidak ada yang cocok untuk server IBM.
- Solusi : Akan disesuaikan dengan standar yang dibutuhkan.

26. Kegiatan Penataan Data Pajak dan retribusi Daerah

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 342.880.000,- dengan output Terlaksananya Pendataan dan tersusunnya Dokumen Pajak Daerah

- Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 92.05%
- Permasalahan : Tidak Ada.
- Solusi : Tidak Ada.

27. Kegiatan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 188.000.000,- dengan output Terlaksananya pendataan, Penyampaian SKPD, Penagihan serta Keberatan WP

- Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 35.67%
- Permasalahan : Belanja cetak (nota perhitungan) tidak digunakan karena sistem SIMPATDA sudah berjalan.
- Untuk SPPD tidak dilaksanakan karena bersamaan dengan kegiatan lain.
- Solusi : Menyesuaikan kebutuhan dan standar harga.

28. Kegiatan Pengendalian Pajak Daerah

Alokasi dana untuk kegiatan Rp. 563.339.000,- dengan output

Terwujudnya Penertiban Reklame dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Daerah

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 89.41%
 Permasalahan : Pelaksanaan pengendalian pajak tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain
 Solusi : Menyesuaikan dengan jadwal kegiatan lainnya.

29. Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan PBB dan BPHTB

Alokasi dana untuk kegiatan Rp. 644.995.000,- dengan output tersedianya Penagihan PBB P2 dan Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 83.48%
 Permasalahan : Jumlah SPPT yang disalurkan dibawah target yang ditetapkan.
 Solusi : Meningkatkan jumlah Wajib Pajak baru.

30 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pajak daerah.

Alokasi dana untuk kegiatan Rp. 433.000.000,- dengan output tersedianya Sistem Komputerisasi Pajak Daerah

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar 88.92%
 Permasalahan : Jasa Konsultasi tidak dilaksanakan karena sisdur/ SOP pajak daerah
 Solusi : Akan disesuaikan dengan kebutuhan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Setelah diberlakukannya nomenklatur dinas yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Jambi No. 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota maka berubah pula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Sedangkan, uraian tugas pokok dan fungsi BPPRD didasarkan pada Peraturan Walikota Jambi N0.60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, BPPRD Kota Jambi berkedudukan

sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Jambi di bidang pendapatan daerah. Adapun tugas pokok dari BPPRD adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pelayanan yang diberikan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah melayani para Wajib Pajak (WP) dapat langsung membayar ke kantor BPPRD Kota Jambi atau melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk seperti Bank 9 Jambi, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank OCBC NISP, dan loket-loket Kantor POS terdekat dengan tempat tinggalnya.

Adapun pajak daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi terdiri dari:

1. Pajak Hotel (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016);
2. Pajak Restoran (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016);
3. Pajak Hiburan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016);
4. Pajak Reklame (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016);
5. Pajak Penerangan Jalan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016);
7. Pajak Parkir (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016);
8. Pajak Air Tanah (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016);
9. Pajak Sarang Burung Walet (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 74 tahun 2016);
10. BPHTB (Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016, Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016);
11. Pajak Bumi dan Bangunan (Peraturan Daerah 4 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah 8 Tahun 2016).

Sedangkan retribusi daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah Retribusi Sewa Panggung Billboard.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Adapun Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat dilihat dalam table berikut;

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi 2011 s/d 2016				
No	TAHUN	TARGET DAN REALISASI 2011-2016		
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	2011	49.623.280.000,00	59.570.219.207,90	120,04%
2	2012	64.280.581.332,00	73.344.781.706,56	114,10%
3	2013	81.317.140.000,00	91.476.549.341,38	112,49%
4	2014	112.472.000.000,00	128.824.086.122,82	114,54%
5	2015	190.882.000.000,00	147.889.448.423,30	77,48%
6	2016	187.252.000.000,00	158.740.884.098,89	84,77%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Pada lima tahun kebelakang ada beberapa hal keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yaitu :

a. Organisasi

Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Subbag dan 4

(empat) Kepala Bidang dengan masing-masing membawahi 3 (tiga) Kasubbid.

Jumlah pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 2.2 Data Jumlah Staff BPPRD

Pegawai	Posisi per 1/1/2016	Tambah	Kurang	Posisi per 31/12/2016
Pelaksana ASN	69	0	0	69
Tenaga Kontrak	54	0	1	53
Jumlah	123	0	1	122

b. Sarana dan Prasarana Mobilitas

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki kendaraan dinas roda enam sebanyak 1unit, roda empat sebanyak 14 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 16unit.

c. Pendapatan Daerah

Dari tabel dibawah ini terlihat perkembangan Pendapatan Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi kurun waktu 2011–2016.

TABEL 2.3 REALISASI PAJAK DAERAH KOTA JAMBI

TAHUN 2011 s/d 2016

No	JENIS PENERIMAAN PAJAK DAN BEA	REALISASI TAHUN ANGGARAN (Rp)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hotel	3.608.630.073,00	3.728.445.958,00	4.983.662.829,00	6.693.600.699,00	6.929.780.174,00	9.559.528.743,00
2	Restoran	6.489.287.309,00	7.992.885.060,00	9.605.346.709,00	12.368.950.386,00	16.743.102.485,00	20.746.469.310,00
3	Hiburan	2.274.433.085,00	3.785.606.130,00	4.168.528.889,00	5.065.708.092,00	6.119.125.119,00	7.673.051.524,00
4	Reklame	4.396.409.040,00	5.306.793.041,00	5.566.425.497,00	5.270.552.970,00	6.000.440.224,00	8.475.131.873,00
5	Penerangan Jalan	23.940.278.685,00	28.766.724.190,00	36.817.188.604,00	44.453.359.363,00	52.228.706.863,00	53.976.543.388,00
6	Parkir	220.792.800,00	766.851.745,00	1.235.389.914,00	1.715.817.320,00	2.179.089.556,00	3.206.248.195,00
7	Air Tanah	-	41.670.070,00	49.046.547,00	68.811.408,00	135.932.612,00	184.155.167,00
8	Sarang Burung Walet	-	22.000.000,00	-	-	-	-
9	Mineral Bukan Logam	44.688.250,00	95.618.000,00	106.769.000,00	85.335.000,00	189.350.000,00	168.565.000,00
10	Bumi dan Bangunan	-	-	-	22.209.281.576,77	19.628.912.994,00	18.179.644.803,00
11	Bea Perolehan Hak	18.595.699.965,90	22.838.187.512,56	28.944.191.352,38	30.892.669.308,05	37.735.008.396,30	36.571.546.095,89
	Atas Tanah dan Bangunan						
JUMLAH		59.570.219.207,90	73.344.781.706,56	91.476.549.341,38	128.824.086.122,82	147.889.448.423,30	158.740.884.098,89

Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang Provinsi Jambi.
- b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta koordinator penerimaan pendapatan daerah.
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai.
- d. Tersedianya peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Adanya dukungan dana yang memadai.
- f. Adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak daerah.
- g. Adanya dukungan pemerintah daerah.
- h. Adanya koordinasi antar Instansi yang terjalin baik dalam mengefektifkan penerimaan pendapatan daerah.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Belum stabilnya perekonomian negara sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas.
- c. Belum optimalnya sinergitas antara Instansi pengelola dan pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas.
- f. Belum menerapkan sistem pelaporan dan pembayaran berbasis online.

2.4 Analisa Isu-Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Analisis lingkungan diperlukan agar dapat mengetahui dan menetapkan faktor-faktor keberhasilan suatu organisasi baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Salah satu perangkat yang digunakan dalam menganalisa permasalahan adalah analisa SWOT, yaitu :

Faktor Lingkungan Internal

Strength (Kekuatan)

- a. Adanya sistem komputerisasi pengelolaan pajak (SIMPATDA dan SISMIOP).
- b. Tersedianya anggaran / dana yang memadai.
- c. Terdapatnya Perda dan Perkada sebagai dasar hukum.
- d. Motivasi Kerja pegawai yang baik.
- e. Komitmen pimpinan dan staff untuk mewujudkan misi BPPRD

Weakness (Kelemahan)

- a. Sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif.
- b. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai.
- c. Kordinasi pihak internal dan eksternal belum optimal.
- d. Kualitas Pelayanan belum optimal.
- e. *Responsibility* aparatur yang masih rendah.

Faktor Lingkungan Eksternal

Opportunity (Peluang)

- a. Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- b. Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita positif.
- c. Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian.
- d. Kondisi sosial kota yang aman dan kondusif.
- e. Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat).
- f. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan sistem informasi.
- g. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis.
- h. Kesiadaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Threat (Ancaman)

- a. Kondisi sosial politik tidak stabil.
- b. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan.
- c. Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- d. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah

Dari hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi telah dapat merumuskan faktor-faktor keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Penentuan faktor-faktor keberhasilan dilakukan melalui 4 (empat) strategi, yaitu :

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.
3. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

Review rancangan SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2016 (terlampir) akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2016 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2018, hal ini disebabkan karena program/kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi bersifat rutin dan terus menerus.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2016, maka evaluasi dan analisis kinerja program dan kegiatan dapat disimpulkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

	Indikator Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi (Rp)	% Pencapaian
I	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya jasa pengiriman pengiriman dan pencatatan surat menyurat kantor	1. Terselenggaranya kegiatan surat menyurat selama 1 tahun	7.409.090	87,17%
		2. Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik, internet dan air	2. Terpenuhiya Kebutuhan Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	224.301.315	67,62%
		3. Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD	3. Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan SKPD selama 1 tahun	228.800.000	80,36%
		4. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Serta Bahan Pembersih	4. Terciptanya Kebersihan Kantor	56.566.140	91,38%
		5. Tersedianya Alat Tulis Kantor	5. Terpenuhiya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam 1 tahun	148.631.500	88,00%
		6. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Terpenuhiya Barang Cetakan dan penggandaan	65.317.500	93,31%
		7. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	7. Terpenuhiya Penerangan Kantor yang Cukup	12.705.000	100%
		8. Tersedianya Surat Kabar dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	8. Terpenuhiya Surat Kabar dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	18.285.000	76,89%
		9. Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	9. Terpenuhiya Kebutuhan Makanan dan Minuman	17.977.000	74,15%
		10. Terwujudnya Tenaga Pengamanan dan Pengemudi kantor	10. Terwujudnya Tenaga Pengamanan dan Pengemudi Kantor	73.700.000	79,76%
		11. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	11. Terwujudnya Hubungan Kerjasama yang Baik Antar Instansi	411.011.958	95,36%
II	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana guna peningkatan kinerja aparatur	1. Tersedianya Kendaraan Operasional yang Memadai	1. Terselenggaranya dengan Baik Kegiatan Operasional Kantor	357.280.000	89,32%
		2. Terpenuhiya Pengadaan Mebeleur Kantor	2. Tersedianya Mebeleur Kantor	111.180.000	88,27%
		3. Terlaksananya Peralatan Kantor	3. Tersedianya Peralatan Kantor dalam 1 tahun	106.933.225	77,17%
		4. Kendaraan Dinas/Operasional yang Terawat	4. Terpenuhiya Kendaraan Dinas/Operasional yang Terawat	301.204.235	71,59%

		5. Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kerja	5. Jumlah Peralatan Kerja yang Baik dan Memadai	34.314.000	43,99%
III	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1.Tersedianya Mesin/kartu absensi	1.Terpenuhinya kebutuhan mesin/krtu absensi	34.979.000	99,94%
		2.Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas	2.Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas sebanyak 120 stel	88.080.000	91,18%
IV	Meningkatnya kapasitas aparatur	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur	Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur	11.750.000	31,76%
V	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	1. Terciptanya buku Rumusan Lakip dan Renja	1. Tersusunnya Lakip, RKT, Tapkin dan IKU	3.850.000	77,00%
		2. - Tersusunnya data penerimaan pajak daerah, tersusunnya laporan penerimaan pajak daerah, tersusunnya buku profil pajak daerah kota jambi	2. Tersedianya Data Akuntansi dan Verivikasi, Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Buku Profil Pajak Daerah.	89.400.000	92,37%
		3. Tersedianya Laporan penerimaan pajak daerah dan laporan piutang pajak Daerah	3. Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan laporan piutang pajak daerah	32.500.000	47,18%
VI	Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan	1. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	1. Terciptanya Rumusan rencana Kerja SKPD	7.225.000	47,69%
VII	Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	1. Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah dan Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah	1. Terwujudnya Kesadaran dan Keputusan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak	22.953.000	85,44%
		2. Terlaksananya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pemungutan Pajak BPHTB yaitu: a. Fungsi Pelayanan b. Fungsi Data dan Informasi c. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan	2. Terealisasinya Pelaksanaan Data ulang PBB P2 dan Tercapainya Data Objek Pajak Piutang yang masih ada	1.046.188.500	89,75%
		3.Terlaksananya Pendataan dan Tersusunnya Dokumen Pajak Daerah	3. Terhimpunnya data objek pajak, tersedianya data potensi objek pajak reklame yang akurat	315.630.500	92,05%

	4. Terlaksananya Pendataan, Penyampaian SKPD, Penagihan serta Penyelesaian Keberatan WP	4. Terhimpunnya Data Objek Pajak Daerah, Terwujudnya Pembayaran Pajak tepat waktu serta Tersedianya Data Potensi Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.	67.051.500	35,67%
	5. Terwujudnya Penertiban, Reklame dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Daerah	5. Meningkatkan PAD, Terciptanya Estetika Kota	503.654.000	89,41%
	6. Tersedianya Pengalihan PBB-P2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah.	6. Terwujudnya Pengalihan PBB-P2 dari Pajak Daerah.	538.454.750	83,48%
	7. Tersedianya Sistem Komputerisasi Pajak Daerah	7. Tersedianya Sistem Komputerisasi Pajak Daerah	385.016.000	88,92%

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tidak menampung usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD lain.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, tugas-tugas tersebut dituangkan dalam bentuk rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, sasaran strategis dan kebijakan. Kemudian bila dikaitkan dengan rencana anggaran, maka diketahui seluruh SKPD akan melakukan dalam bentuk program dan kegiatan.

Oleh karena itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi diharuskan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA dan DPA) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

a. Tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2013 – 2018 adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

b. Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam waktu yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2013 – 2018 adalah Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

3.3 Target Pajak Daerah Tahun 2018

Target pendapatan pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebesar Rp 200.100.000.000,00, serta untuk target untuk retribusi adalah sebesar Rp 73.947.471.000,-

Tabel 3.1
Proyeksi Target Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Th. 2018

Jenis Pajak dan Retribusi	Target (Rp)
Pajak	
Hotel	11.800.000.000
Restoran	25.000.000.000
Hiburan	9.000.000.000
Reklame	10.500.000.000
Penerangan Jalan	55.000.000.000
Parkir	4.000.000.000
Air Tanah	500.000.000
Sarang Burung Walet	20.000.000
Mineral Bukan Logam	280.000.000
PBB	34.000.000.000
BPHTB	50.000.000.000
Total Pajak	200.100.000.000
Retribusi	
Retribusi Sewa Gedung Sekolah Simp IV Sipin	42.000.000
Retribusi Pelayanan Kesehatan Via Dinas Kesehatan	2.300.691.000
Retribusi Klaim Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi	800.000.000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	18.840.000
Sewa Alat Berat	200.000.000
Sewa AMP	400.000.000
Retribusi Penyediaan dan/ Penyedotan Kakus	360.000.000
Retribusi Pelayanan Kesehatan Via RSUD	26.500.000.000
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000
Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor	3.500.000.000

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	250.000.000
Retribusi Terminal	896.000.000
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.090.000.000
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.000.000.000
Sewa Mobil Jenazah	2.000.000
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.000.000
Retribusi Izin Gangguan/ HO	3.500.000.000
Retribusi Masuk Hutan Kota M. Sabki	100.000.000
Retribusi Pelayanan Persampahan	9.085.940.000
Retribusi Rumah Potong Hewan	250.000.000
Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan	2.150.000.000
Sewa Panggung Billboard	30.000.000
Retribusi Penjualan Produksi usaha daerah (Benih ikan)	120.000.000
Retribusi Meteorologi	100.000.000
Retribusi Pelayanan Pasar	1.850.000.000
Total Retribusi	73.947.471.000

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan prioritas Daerah yang dijabarkan pada program kegiatan dalam RENSTRA 2013-2018 yaitu:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Perencanaan SKPD
7. Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.2 Kegiatan

Program tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan yang merupakan rencana kegiatan tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
11. Perjalanan Dinas
12. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
13. Pengadaan Mebeleur

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

14. Pengadaan Peralatan Perkantoran
15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – Alat Kantor
18. Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor
19. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
20. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
21. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23. Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah
24. Evaluasi penerimaan pajak daerah.
25. Penyusunan Renstra
26. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
27. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
28. Pengendalian Pajak Daerah
29. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
30. Penagihan Pajak Daerah
31. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian rencana Program dan Kegiatan untuk tahun 2018, diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan keseluruh aparat dalam organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sehingga memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2018 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis demi tercapainya tujuan strategis.

Jambi, 2017

KEPALA BADAN

SUBHI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630820 198603 1 009